

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pemikiran**

Perjalanan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme dan imperialisme secara resmi berakhir pada 17 Agustus 1945 melalui proklamasi kemerdekaan. Namun, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berbagai pergolakan politik dan keamanan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Barat dengan munculnya Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

PRRI tidak hanya merupakan peristiwa politik, tetapi juga cerminan dari ketidakpuasan masyarakat daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Tuntutan terhadap pembentukan pemerintahan yang lebih otonom dan pembangunan yang lebih merata menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi peristiwa ini. Keberatan terhadap dominasi Jawa dalam berbagai aspek pemerintahan, ketidakpuasan terhadap komposisi personil militer, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap perkembangan PKI turut memperkeruh situasi. Kondisi politik nasional yang tidak stabil, seringnya pergantian kabinet, serta pembubaran Konstituante semakin memperburuk keadaan, hingga akhirnya memicu terbentuknya dewan-dewan di Sumatera, termasuk Dewan Banteng di Sumatera Barat sebagai pusat perlawanan dan menjadikan keberadaan masyarakat Sumatera Barat ikut masuk kedalam pusaran perlawanan atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah di Jakarta (Leirissa, 1997). Meskipun gerakan PRRI bertujuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat daerah, pemerintah pusat meresponsnya dengan tindakan militer. Operasi militer dengan sandi Operasi 17 Agustus pada akhirnya berhasil menumpas pemberontakan ini.

Konflik PRRI yang berlangsung antara tahun 1958 hingga 1961 pada akhirnya berujung pada kegagalan. Meskipun demikian, pemberontakan yang dianggap setengah hati ini tetap tercatat sebagai bagian dari sejarah kelam Indonesia dan

meninggalkan luka yang mendalam khususnya dalam memori kolektif masyarakat Sumatera Barat (Harvey, 1984). Salah satunya adalah dampak sosial yang berupa stigma negatif yakni cap sebagai pemberontak yang dilekatkan kepada masyarakat Sumatera Barat.

Melihat peran Sumatera Barat dan masyarakat Minangkabau yang besar pada beberapa tahun atau dekade sebelumnya, dimana masyarakat Sumatera Barat bisa berdiri dengan tegak bersatu dalam upaya mengusir penjajah ataupun dalam proses mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya partisipasi tokoh asal Minangkabau yang mengisi kursi-kursi pemerintahan seperti Wakil Presiden Moh. Hatta, Perdana Menteri Sutan Sjahrir, K.H. Agus Salim. Bahkan masyarakat Minangkabau juga berpartisipasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan melalui Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukittinggi dengan Presidennya saat itu Mr. Syafruddin Prawiranegara yang juga berdarah Minangkabau. Peran masyarakat Minangkabau yang sangat besar inilah yang menyebabkan ketika peristiwa PRRI gagal, muncullah rasa malu dan hina yang sangat besar di masyarakat. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah untuk didamaikan, pada akhirnya masyarakat Sumatera Barat harus beradaptasi sebagai jalan keluar dalam menciptakan keseimbangan baru dalam tatanan yang lebih baik. Proses adaptasi untuk keluar dari memori kelam tersebut, menjadi hal yang menarik untuk diteliti, hal ini dapat memberikan gambaran bagaimana sebuah masyarakat dapat bertahan dan kemudian memenangkan sejarah sesuai dengan apa yang mereka inginkan

Pada penelitian sebelumnya, Sumatera Barat pasca-PRRI telah dibahas oleh Arfan Ari Shandy pada tahun 2008, dengan judul *Harun Zain: Strategi Mambangkik Batang Tarandam Dalam Kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat*. Penelitian ini membahas kepemimpinan Harun Zain sebagai tokoh intelektual dan gubernur Sumatera Barat di era orde baru dalam mengatasi masalah dan merekonstruksi Sumatera Barat pasca PRRI. Sedangkan pada penelitian Anggy Syafitra pada tahun 2021 dengan judul *Sumatera Barat pasca PRRI: Mambangkik Batang Tarandam di Masa Pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988*. Penelitian ini tidak jauh berbeda, objeknya masih terkait dengan kepemimpinan,

dimana penelitian ini berfokus pada Azwar Anas dalam meneruskan kepemimpinan gubernur sebelumnya dan menekankan pada kebijakan pemerintah daerah dan upaya formal dalam rekonstruksi Sumatera Barat (Syafitra, 2021).

Namun, belum ada kajian yang secara khusus menelaah dampak sosial dari pemberontakan PRRI terhadap kehidupan masyarakat Sumatera Barat dalam jangka panjang. Aspek-aspek dampak sosial seperti trauma kolektif, perubahan identitas, pola migrasi, relasi sosial, perubahan nilai budaya, hingga proses adaptasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sering kali tidak menjadi fokus utama. Padahal, konflik bersenjata seperti PRRI tidak hanya berdampak pada tataran struktural pemerintahan, tetapi juga sangat memengaruhi kondisi psikososial masyarakat secara luas.

Dalam penelitian yang berjudul "Dampak Sosial Pasca Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat: Perubahan, Tantangan, dan Adaptasi Masyarakat Minangkabau (1961–1984)". Penulis merasa tertarik untuk mengangkat topik ini karena ingin mengeksplorasi bagaimana masyarakat sipil di Sumatera Barat mengalami, merespons, dan menyesuaikan diri setelah periode konflik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial, penelitian ini berupaya merekonstruksi pengalaman-pengalaman masyarakat pasca-PRRI yang selama ini kurang terwakili dalam wacana sejarah resmi. Penelitian ini akan menggali narasi dari bawah (*history from below*) sebagai upaya untuk melihat bagaimana memori kolektif, dinamika sosial, dan proses penyembuhan masyarakat berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni dari tahun 1961 hingga 1984.

## B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

### 1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian fokus dan terarah, Penelitian ini memiliki batasan spasial yang difokuskan pada masyarakat beretnis Minangkabau yang berada pada wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan titik perhatian pada daerah-daerah yang mengalami dampak langsung dari pemberontakan PRRI serta menjadi ruang utama terjadinya perubahan dan adaptasi sosial masyarakat pasca konflik. Beberapa wilayah utama yang menjadi fokus kajian meliputi Kota Padang dan Bukittinggi,

yang secara historis dikenal sebagai pusat pemrintahan dan aktivitas provinsi serta basis penting PRRI. Kedua kota ini mencerminkan dinamika sosial, trauma masyarakat, dan perubahan struktur hubungan sosial yang kuat pasca pemberontakan dan upaya rekonstruksi sosial. Selain itu, Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Lima Puluh Kota dipilih untuk merepresentasikan wilayah inti dalam kebudayaan Minangkabau serta Kabupaten Solok dan Pesisir Selatan sebagai wilayah yang terdekat dari pusat konflik. Pembatasan spasial berbasis kesukuan dengan menyesuaikan batas administratif ini ditujukan agar penelitian terfokus hanya kepada masyarakat Minangkabau yang benar-benar tinggal di Sumatera Barat ataupun sempat merantau ke daerah lain tetapi masih berasal dari Sumatera Barat.

Penelitian ini juga memiliki batasan waktu atau batasan temporal mulai dari tahun 1961 hingga 1984. Hal ini dikarenakan penelitian ini berfokus pada pasca peristiwa PRRI di Sumatera Barat di tahun 1961 ketika PRRI dibubarkan dan Kolonel Ahmad Husein resmi menyerah kepada pemerintah pusat hingga masa kembali dan bangkitnya masyarakat Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Azwar Anas yang ditandai dengan diperolehnya penghargaan *Parasamya Purnakarya Nugraha* di tahun 1984. Batasan spasial dan temporal dibuat dengan tujuan untuk menjaga fokus penelitian agar tetap relevan dengan konteks sejarah yang dikaji.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran, latar belakang, serta alasan penelitian yang sudah dikemukakan, maka masalah utama yang akan dianalisis adalah

- a. Bagaimana peristiwa PRRI berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat?
- b. Bagaimana proses adaptasi masyarakat Sumatera Barat untuk keluar dari permasalahan sosial dan stigma negatif pasca pemberontakan PRRI di Sumatera Barat pada tahun 1961–1984?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menganalisis berbagai macam masalah sosial yang muncul pasca peristiwa PRRI di Sumatera Barat serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di sektor sosial serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkaya studi sejarah Indonesia, khususnya dalam mengisi kekosongan kajian mengenai dampak sosial dari konflik bersenjata PRRI di Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat untuk memahami bagaimana konflik masa lalu masih memiliki dampak dalam dinamika sosial masyarakat kontemporer, baik dari segi identitas, relasi pusat-daerah, maupun proses rekonsiliasi budaya dan sejarah lokal.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan dialog kritis sebagai sarana penyelesaian konflik secara damai, sebagai medium untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat Sumatera Barat, serta sebagai landasan dalam menjaga persatuan dan stabilitas sosial pascakonflik.

## D. Kerangka Analisis

Perbedaan nasib antar penduduk tidak jarang menimbulkan rasa iri atau kecemburuan sosial, kecemburuan sosial ini dapat berujung pada pemisahan sosial atau jarak sosial yang menimbulkan rasa atau anggapan pemisahan diri dari masyarakat. Tidak jarang pula akhir dari sikap ini adalah usaha keluar dari situasi melalui pemberontakan.

Dalam menganalisis dampak sosial pasca pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis, yaitu teori konflik, teori perubahan sosial, teori trauma, dan teori rekonstruksi sosial sosial. Keempat teori ini saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana masyarakat menghadapi perubahan, tantangan, serta proses adaptasi setelah peristiwa yang mengguncang stabilitas sosial dan politik daerah.

Teori konflik memberikan perspektif mengenai latar belakang dan dampak sosial dari pemberontakan PRRI. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa konflik merupakan unsur yang berkaitan dalam masyarakat dan menjadi pemicu utama perubahan sosial (Marx, 2002). Marx melihat bahwa konflik antara kelompok dominan dan kelompok tertindas dapat memunculkan ketegangan yang berujung pada perubahan struktur sosial. Relevansi teori ini terletak pada kenyataan bahwa PRRI merupakan ekspresi konflik antara elite lokal Sumatera Barat dan pemerintah pusat terkait ketimpangan pembangunan dan distribusi kekuasaan. Weber (1978) dalam buku *Economic and society* juga menambahkan konflik sosial tidak hanya bersumber dari pertentangan kelas ekonomi, tetapi juga dari perebutan status sosial dan kekuasaan politik yang dilegitimasi oleh negara. Oleh karena itu, teori konflik weber ini sangat berkaitan juga dengan teori perubahan sosial sebagai dampak dari konflik tersebut. Ia menambahkan bahwa perubahan sosial merupakan hasil dari proses rasionalisasi dan pergeseran otoritas dari tradisional menuju rasional-legal yang kerap memunculkan ketegangan sosial baru. Sedangkan Dahrendorf (1959) berpendapat bahwa konflik tidak hanya berkisar pada kelas ekonomi, tetapi juga terjadi dalam institusi sosial lain seperti birokrasi dan militer. Dalam kasus PRRI, konflik pusat-daerah tersebut memicu represi yang berdampak pada struktur sosial lokal.

Sejalan dengan itu, teori perubahan sosial menjadi salah satu pendekatan utama dalam memahami transformasi masyarakat Sumatera Barat pasca-PRRI. Perubahan sosial merupakan proses terjadinya transformasi dalam struktur, nilai, norma, dan sistem sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Jika pada bagian sebelumnya Weber menjelaskan teori konflik saling berkaitan dengan teori perubahan sosial, Soekanto (2006) juga menambahkan bahwa, perubahan sosial dapat berlangsung secara

lambat maupun cepat, tergantung pada faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Dalam konteks pasca PRRI, masyarakat Sumatera Barat mengalami perubahan struktur sosial dan pola interaksi sebagai respon terhadap trauma politik dan kebijakan pembangunan rezim Orde Baru. Davis menekankan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam struktur sosial, sementara Ogburn (1964) mengembangkan konsep *cultural lag*, yaitu kesenjangan antara perubahan aspek material dan non-material dalam masyarakat. Dalam konteks Sumatera Barat, perubahan sosial terjadi akibat intervensi pemerintah pusat, kebijakan politik Orde Baru, dan pergeseran peran sosial dalam masyarakat Minangkabau. Pasca pemberontakan, pola kepemimpinan tradisional mengalami perubahan, terutama dalam peran niniak mamak dan ulama yang sebelumnya sangat dominan dalam kehidupan sosial. Selain itu, struktur ekonomi juga mengalami pergeseran akibat represi politik dan kebijakan sentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Dampak jangka panjang dari Pemberontakan PRRI tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga psikologis dan emosional. Oleh karena itu, teori trauma sosial menjadi penting untuk menjelaskan dampak psikososial dari pemberontakan PRRI terhadap masyarakat Minangkabau. Alexander (2004) menyatakan bahwa trauma sosial muncul ketika suatu komunitas mengalami peristiwa mengerikan yang mengganggu identitas kolektif mereka, dan pengalaman ini diwariskan lintas generasi. Dalam kasus PRRI, pengalaman traumatis akibat represi militer, pengawasan ketat terhadap mantan pemberontak, serta tekanan ekonomi dan sosial pasca pemberontakan meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Keterangan ini diperkuat oleh Ilham (2018) dalam artikelnya di Tabuah, yang menunjukkan bagaimana umat Islam di Sumatera Barat mengalami disorientasi pasca PRRI akibat posisi ambigu para ulama dan ketegangan politik yang berkepanjangan. Dengan menggunakan pendekatan trauma sosial, kita bisa menganalisis bagaimana peristiwa PRRI tidak hanya menjadi sejarah politik, tetapi juga meninggalkan bekas dalam memori kolektif masyarakat.

Pasca konflik, masyarakat tidak hanya mengalami perubahan sosial khususnya mental, tetapi juga harus membangun kembali kehidupan sosial mereka melalui

proses rekonstruksi sosial. Teori rekonstruksi sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Counts dan Dewey (1936), merupakan proses sadar untuk mengubah dan membangun kembali masyarakat melalui pendidikan, kebijakan, dan tindakan kolektif. Dalam konteks Sumatera Barat, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat yang memperkuat kontrol terhadap daerah, serta beradaptasi dengan perubahan peran sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai adat Minangkabau yang sebelumnya menjadi dasar kehidupan sosial juga mengalami rekonstruksi seiring dengan upaya masyarakat untuk mencari keseimbangan antara identitas lokal dan kebijakan nasional yang semakin menguatkan sentralisasi.

Dengan menggabungkan teori perubahan sosial, teori konflik, teori rekonstruksi sosial, dan teori trauma sosial, penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai dampak sosial pasca Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Keempat teori ini menjelaskan bagaimana masyarakat mengalami perubahan sosial akibat konflik, menghadapi tantangan dalam rekonstruksi kehidupan sosial mereka, serta mengatasi trauma kolektif yang ditinggalkan oleh peristiwa tersebut.

## E. Metode dan Bahan Sumber

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) yang penyajiannya menggunakan metode deskriptif-analisis. Menurut Sugiyono (2017), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, keadaan, atau gejala yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu. Sementara analisis dalam penelitian bertujuan untuk mencari makna atau pemahaman yang lebih mendalam dari data yang telah dikumpulkan. Metode ini digunakan tidak hanya untuk mendeskripsikan data, tetapi juga untuk menganalisisnya guna menarik kesimpulan umum. Disisi yang lain, penelitian sejarah juga dapat merekonstruksi sebanyak-banyaknya peristiwa masa lampau manusia. Penelitian sejarah menurut Nugroho

Notosusanto terdiri dari 4 tahapan pokok yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan sejarah.

Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Heuristik. Heuristik atau pengumpulan objek yang berasal dari zaman itu dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang dianggap relevan (Notosusanto, 1993). Dalam penelitian kali ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan sumber baik sumber primer seperti melakukan wawancara dengan para narasumber warga lokal maupun perantauan asal Minangkabau dan juga mencari arsip surat maupun dokumen yang berkaitan dengan peristiwa pasca-PRRI di Sumatera Barat. Serta sumber sekunder seperti buku, artikel, maupun jurnal yang membahas mengenai peristiwa PRRI di Sumatera Barat. Bagian heuristik ini berkaitan dengan mencari sumber yang menjelaskan bagaimana latar belakang peristiwa ini bisa terjadi, siapa saja tokoh yang terlibat didalamnya, bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (PRRI) saling merespon dan bersikap, bagaimana usaha diplomasi yang dilakukan, bagaimana usaha penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti melalui operasi 17 Agustus, bagaimana nasib tokoh PRRI dan daerah khususnya wilayah Sumatera Barat pasca pemberontakan dan bagaimana dampaknya pada masyarakat di Sumatera Barat.

Setelah mendapatkan data yang relevan dengan topik, penelitian dilanjutkan pada tahap metode sejarah selanjutnya, yaitu kritik sumber. Tahap kritik dibagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal (otentisitas) dan kritik internal (kredibilitas). Kritik ekstern berfokus pada keaslian sumber sejarah dengan menilai aspek fisik sumber tersebut, termasuk asal-usul, kondisi, dan kemungkinan pemalsuan atau interpolasi. Dalam penelitian ini, kritik ekstern dilakukan dengan menelusuri keaslian dokumen-dokumen resmi, arsip negara, surat kabar sezaman, dan laporan pemerintah yang membahas Pemberontakan PRRI serta dampak sosial yang ditimbulkannya di Sumatera Barat. Sebagai contoh, dokumen-dokumen dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) seperti surat kawat dari pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat ataupun surat memoar yang dikirimkan mantan anggota PRRI yaitu Karana Sutan Marajo bisa diuji keasliannya untuk memastikan

bahwa dokumen tersebut berasal dari lembaga resmi yang kredibel serta tidak mengalami perubahan atau modifikasi dalam proses pelestariannya.

Sementara itu, kritik intern dilakukan untuk menilai kredibilitas isi dari sumber sejarah yang telah dinyatakan autentik melalui kritik ekstern. Dalam konteks penelitian ini, kritik intern diperlukan untuk mengidentifikasi bias dalam sumber dan memastikan akurasi fakta yang dikandungnya. Sebagai contoh seperti surat kawat dari pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat ataupun surat memoar Karana Sutan Marajo mantan anggota PRRI yang bisa jadi lebih berpihak kepada pihak PRRI ataupun pemerintah saja, sehingga perlu dikritisi dengan membandingkannya dengan sumber-sumber dari pihak lain, Begitu pula dalam wawancara dengan narasumber yang mengalami langsung peristiwa ini, peneliti harus mempertimbangkan aspek subjektivitas serta kemungkinan adanya ingatan yang terdistorsi oleh pengalaman traumatis atau faktor politik

Kemudian ditahap ketiga dalam penelitian ini adalah interpretasi. Interpretasi merupakan tahap penafsiran terhadap fakta sejarah yang telah dikumpulkan dan diuji keabsahannya melalui kritik sumber. Pada tahap ini, peneliti harus menghubungkan berbagai sumber sejarah, menganalisis keterkaitan antarperistiwa, serta memberikan makna terhadap data yang ditemukan agar dapat menjelaskan suatu fenomena sejarah secara lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan untuk memahami dampak sosial pasca-Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, dengan menelusuri bagaimana masyarakat mengalami perubahan sosial, menghadapi tantangan, serta beradaptasi setelah peristiwa tersebut. Sebagai contoh, dari hasil kritik sumber dalam sumber wawancara dengan para narasumber ditemukan fakta bahwa pasca-penumpasan PRRI, terjadi migrasi besar-besaran masyarakat Sumatera Barat ke daerah lain. Interpretasi dari fenomena migrasi ini tentu saja menimbulkan dampak negatif seperti banyaknya laki-laki muda yang merantau dan menyisakan kaum perempuan serta kaum lansia menyebabkan perubahan struktur demografis dimasyarakat Sumatera Barat. Tetapi fenomena migrasi ini juga memberikan dampak positif berupa tersebarnya masyarakat Sumatera Barat ke seluruh penjuru Nusantara, dan secara tidak

langsung membentuk komunitas masyarakat rantau yang pada akhirnya memiliki kekuatan secara sosial dan ekonomi.

Selain itu, dalam tahap interpretasi, perlu dianalisis bagaimana stigma terhadap masyarakat Sumatera Barat berkembang dalam konteks sosial-politik pasca-PRRI. Jika dokumen-dokumen pemerintah menunjukkan bahwa gerakan PRRI dianggap sebagai pemberontakan terhadap negara, maka perlu dilakukan interpretasi terhadap dampaknya bagi masyarakat yang ditinggalkan, termasuk perubahan identitas sosial. Fenomena masyarakat Minangkabau yang memilih mengganti nama agar lebih bercorak ke-Jawaan bukan hanya sekadar tindakan individu, tetapi dapat ditafsirkan sebagai bentuk adaptasi sosial akibat tekanan politik dan budaya.

Interpretasi juga dapat diterapkan dalam memahami trauma sosial yang dialami oleh masyarakat Sumatera Barat setelah peristiwa PRRI. Berdasarkan sumber lisan dari narasumber yang mengalami langsung periode tersebut, dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang mengalami ketidakpastian sosial dan ekonomi akibat represi terhadap mereka yang dianggap terlibat dalam PRRI. Dengan membandingkan kesaksian ini dengan dokumen resmi atau sumber akademik lainnya, peneliti dapat memberikan makna lebih dalam terhadap bagaimana masyarakat Sumatera Barat menghadapi tantangan dan mencari strategi bertahan dalam kondisi yang penuh tekanan.

Keempat adalah penulisan sejarah. Menurut Notosusanto, Proses penulisan kembali peristiwa sejarah merupakan tahap dimana fakta yang sudah disintesiskan dan dianalisis, dipaparkan dalam bentuk tulisan. Pada tahap ini penulis menuliskan peristiwa sejarah yang sedang diteliti berdasarkan hasil rekonstruksi fakta yang telah terkumpul, tentu saja setelah melalui 3 tahap sebelumnya.

## 2. Bahan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer dalam bentuk sumber lisan berupa wawancara dengan tokoh ataupun masyarakat yang hidup disekitar periode waktu 1961-1984, dan sumber tertulis berupa surat atau dokumen yang terkait langsung dengan peristiwa. Penulis juga menemukan sumber sekunder

berupa buku dengan judul *Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatra Barat dan politik Indonesia 1926–1998* karya Audrey Kahin, buku *Tokoh yang berhati rakyat: Harun Zain* dan buku *Azwar Anas: Teladan dari Ranah Minang* karya Abrar Yusra, buku *Sumatera Barat di panggung sejarah 1945–1995* karya Mestika Zed, dan buku *Merantau: Pola migrasi suku Minangkabau* karya Mochtar Naim, artikel, jurnal yang berjudul *Sumatera Barat pasca PRRI: Mambangkik batang tarandam di masa pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977–1988* karya Anggy Syafitra, serta arsip berupa berita atau surat kabar sezaman, Sumber-sumber ini peneliti sudah dan akan dapatkan di Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan UPT UNJ, Perpustakaan UNP, Perpustakaan Universitas Andalas dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

